

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

India merupakan sebuah negara yang terletak di Benua Asia Selatan dengan jumlah penduduk yang banyak, mengutip dari *Worldometer* dan PBB, terdapat kurang lebih 1.4 miliar jiwa yang berkependudukan di India per-tanggal 25 Juni tahun 2022 (*Worldometer*, 2022). India juga dikategorikan sebagai salah satu negara *emerging economies*, yaitu negara dengan perkembangan ekonomi yang baik. Di sisi lain, India juga masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan, sebagai contoh dari kondisi perekonomiannya.

Walaupun India dikategorikan sebagai salah satu negara yang diantisipasi perkembangan ekonominya, tetapi di sisi lain negara ini masih dihadapkan dengan ketimpangan ekonomi, kemiskinan struktural, kelaparan, dan beberapa permasalahan lainnya. Selain itu, terdapat juga tantangan mengenai kondisi sosial dan budaya dalam negeri, politik, dan juga keamanan nasional. Termasuk juga peristiwa di tahun 2020, saat India sempat terlibat perselisihan di perbatasan wilayah negaranya dengan China.

India dan China merupakan negara tetangga yang berdekatan dan memiliki dinamika hubungan yang beragam. Keduanya tergabung ke dalam organisasi BRICS (Brazil, Russia, India, China, dan Afrika Selatan), yaitu organisasi yang mengedepankan kerjasama, keamanan, dan perkembangan ekonomi (BRICS, 2015). BRICS merupakan salah satu dari sejumlah kerjasama antara India dan China dalam dunia internasional. Di sisi lain, keduanya juga kerap kali dihadapkan

dengan beberapa permasalahan, termasuk juga permasalahan terkait dengan keamanan nasional kedua negara oleh karena perselisihan di perbatasan wilayah.

Perselisihan ini terjadi pada 15 Juni tahun 2020 di wilayah perbatasan dekat Pegunungan Himalaya, tepatnya di Lembah Galwan yang dipercaya menjadi salah satu wilayah strategis bagi kedua negara. Ketegangan di wilayah perbatasan ini memang menjadi salah satu isu keamanan nasional utama bagi India sejak tahun 1962, kemudian kembali meningkat ketika terdapat konfrontasi antara tentara India dengan China di wilayah pada tahun 2020 silam (Gokhale, 2021). Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah India memutuskan untuk memblokir 59 aplikasi asal China dengan alasan keamanan nasional dan privasi, yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2020.

Keputusan tersebut juga ditegaskan oleh pemerintah India didasari oleh isu keamanan nasional yang dilanggar oleh China melalui ruang siber, tepatnya melalui teknologi dan informasi di India. Kebijakan ini juga diindikasikan berkaitan dengan salah satu visi dan misi dalam inisiatif terbaru dari Perdana Menteri Narendra Modi mengenai kemandirian India, yaitu "*Atmanirbhar Bharat Abhiyaan*" atau disebut juga sebagai "*Self-reliant*" India (Government of India, 2020). Inisiatif terbaru ini dibuat sebagai salah satu landasan dalam menjalankan berbagai kebijakan di India, termasuk juga dalam menangani berbagai permasalahan nasional dan internasional India. Utamanya sebagai bagian dari pilar yang mengedepankan keamanan nasional dan perlindungan serta perkembangan dalam sistem teknologi dan informasi di India (Invest India, 2020).

Peristiwa ini tentunya menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, khususnya penolakan dari pemerintah China. China memberikan ketegasan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh India sama sekali tidak relevan. Alasan yang mendasari pemblokiran aplikasi oleh India ini juga menimbulkan banyak keraguan dari warga negara India sendiri, yang sebenarnya banyak bergantung dari aplikasi-aplikasi asal China tersebut. Pemerintah India juga kembali menegaskan bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan tersebut telah melewati proses pertimbangan yang mendalam, utamanya guna melindungi integritas dan keamanan nasional dari India.

Peristiwa ini juga menimbulkan dampak yang cukup besar dalam berbagai sektor. Banyak masyarakat India yang jadi kehilangan sumber pendapatannya, banyak kantor-kantor terpaksa tutup, dan tentunya dampak terhadap hubungan antara India dan China itu sendiri. Di lain sisi, China juga banyak mengalami kerugian yang besar dengan adanya kebijakan pemblokiran aplikasi ini. Utamanya aplikasi TikTok, yang sedang mencapai tingkat tinggi kepopulerannya, menjadi kehilangan pasar terbesarnya yaitu di India.

Berdasarkan dari topik penelitian ini terdapat beberapa tinjauan pustaka yang memiliki kemiripan dengan penelitian. Namun, belum ada yang secara spesifik membahas mengenai kebijakan pemblokiran aplikasi *software* dari China di India berdasarkan gagasan *Atmanirbhar Bharat Abhiyaan*. Beberapa hasil tinjauan pustaka pertama adalah jurnal berjudul “*A New Quest for Self-Reliance: East Asia and Indian Economic Nationalism*”, yang membahas mengenai inisiatif dari Perdana Menteri Narendra Modi di India “*Self-Reliant*”, tetapi tidak secara

spesifik membicarakan mengenai kebijakan pemblokiran aplikasi *software* asal China. Pembahasan pada jurnal ini lebih berfokus kepada bagaimana pengaruh dari kebijakan luar negeri di bidang ekonomi India dan pengaruhnya terhadap hubungan India dengan negara-negara di Asia Timur. Lebih spesifiknya, jurnal ini juga membahas mengenai Nasionalisme Ekonomi India dan kondisi di mana India dianggap memasuki era baru dari “*neo-mercantilism*” (Chacko, 2021).

Selanjutnya, terdapat jurnal yang berjudul “*TikTok Politics: Tit for Tat on the India-China Cyberspace Frontier*”, yang membahas mengenai pemblokiran aplikasi asal China di India, terumanya TikTok. Jurnal ini membahas dari kacamata keamanan pengguna, *cyber security*, dan kaitannya dengan perselisihan yang terjadi di perbatasan wilayah India dan China. Secara spesifik, fokus pada jurnal ini adalah pembahasan dari segi keamanan dalam dunia social media dan kaitannya dengan latar belakang geopolitik antara India dan China (Mishra & Yan, 2022).

Selain dari dua penelitian tersebut, terdapat juga pembahasan yang membahas topik serupa dengan penelitian ini yang berupa *report article*. Pertama, yaitu “*The Indian Government Ban on Chinese Based Apps and the Singapore Connection*”, yang hanya focus membahas fenomena pemblokiran aplikasi asal China dan pengaruhnya terhadap *app developers* asal Singapore (Hemrajani, 2022).

Terakhir, terdapat juga topik serupa dalam hasil diskusi yang berjudul “*India’s Self-Reliance Initiative: Old Idea or New Direction?*”, yang membahas mengenai hasil diskusi dari para akademisi terkait dengan kampanye dari Perdana Menteri Narendra Modi dan kaitannya dengan visi lama dari India, yaitu *Swadeshi* (Sen & Murali, 2021). Hasil diskusi ini memiliki pembahasan yang mirip dengan

topik penelitian. Namun, peneliti memberikan pandangan dan teori yang berbeda dalam menjelaskan fenomena ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh dari gagasan *Self-reliant India* dalam *Atmanirbhar Bharat Abhiyaan* dalam perumusan kebijakan, yaitu pemblokiran aplikasi *software* asal China di India. Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan menggunakan kerangka teori Gagasan dan Kebijakan Luar Negeri oleh Judith Goldstein dan Robert O. Keohane. Maka dari itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru mengenai keterkaitan dari kebijakan pemerintah India terhadap China tersebut, dengan visi misi dari kampanye terbaru pemerintahan India, yaitu *Atmanirbhar Bharat Abhiyan* atau disebut juga dengan “*Self-reliant India*” atau Kemandirian India.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disebutkan, maka penelitian ini mengangkat perumusan masalah: bagaimana gagasan *Atmanirbhar Bharat Abhiyaan* mempengaruhi kebijakan pemblokiran aplikasi *software* asal China di India?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini memiliki tujuan umum untuk menjelaskan mengenai fenomena pemblokiran aplikasi asal China di India yang terjadi di bawah rezime Perdana Menteri Narendra Modi.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan khusus untuk menjelaskan pengaruh gagasan “*Atmanirbhar Bharat Abhiyaan*” terhadap kebijakan India yang memutuskan untuk memblokir aplikasi *software* asal China.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini, memiliki sejumlah kegunaan yang dapat dimanfaatkan secara akademis dan juga kegunaan secara praktis. Adapun kegunaan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Akademis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pandangan baru dan kontribusi dalam mengisi kekosongan literatur pada studi Hubungan Internasional, khususnya terkait dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah India mengenai isu keamanan dan kemandirian nasional India terhadap China dalam perspektif yang berbeda. Diharapkan dengan adanya penelitian ini juga, dapat memberikan kontribusi dalam berbagai kepentingan akademik. Utamanya dalam memberikan wawasan dan informasi baru untuk tujuan penelitian dan atau penulisan karya ilmiah lainnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Dalam kegunaannya secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pembuat kebijakan di India dan memicu lebih banyak lagi pemerhati kasus isu dibalik sebuah gagasan dalam perumusan kebijakan di India tersebut.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. *Teori Gagasan dan Kebijakan Luar Negeri*

Penelitian ini menggunakan teori yang diusung oleh Judith Goldstein dan Robert Keohane yang membahas mengenai gagasan dan Kebijakan Luar Negeri (Goldstein & Keohane, 1993). Secara spesifik, membahas bagaimana gagasan mempengaruhi individu, kelompok, organisasi, atau negara dalam membuat kebijakan baik dalam, maupun luar negeri. Argument utama dalam teori ini juga percaya bahwa gagasan akan mempengaruhi sebuah kebijakan ketika prinsip dan kepercayaan yang telah tertanam dalam individu atau aktor dalam dunia internasional kemudian menjadi melekat ke dalam institusi politik.

Pada teori ini, dipercaya bahwa gagasan sangat berpengaruh terhadap sebuah kebijakan, karena juga dianggap berfungsi untuk menuntun individu dalam berperilaku atau dalam mengambil sebuah keputusan. Salah satu hal yang juga menjadi *highlight* dari teori ini adalah bahwa, Goldstein dan Keohane, menekankan bahwa kepentingan bukan menjadi alasan utama di dalam sebuah kebijakan. Tetapi, terdapat ide, namun juga bukan berarti kepentingan tidak diikutsertakan. Hanya saja, kepentingan ini tetap berarti dan mempengaruhi adanya kebijakan

Pada teori mengenai gagasan yang dibahas dalam buku oleh Goldstein dan Keohane ini, kedua penulis membedakan 3 tipe dari kepercayaan yang termasuk sebagai alat untuk analisa bagaimana gagasan mempengaruhi sebuah kebijakan. 3 kebijakan tersebut di antaranya adalah

world views, *principled beliefs*, dan *causal beliefs* (Goldstein & Keohane, 1993, pp. 8-11). Dimana ketiganya dapat menjadi pembeda dan menjadi dasar dalam melihat sebuah gagasan dalam kebijakan. Secara sederhana peneliti akan menjelaskan mengenai ketiga kepercayaan yang tertanam dalam gagasan dan menjadi salah satu pemicu munculnya sebuah kebijakan.

Yang pertama adalah *world views*, yaitu pandangan secara internasional terhadap sebuah keyakinan dan atau kepercayaan. *World views* ini berkaitan erat dengan bagaimana masyarakat mengartikan identitas dan kesetiaan dalam diri mereka. Bukti nyata adalah bagaimana keyakinan terbanyak dalam dunia, mempengaruhi cara pandang masyarakat dan gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dituliskan oleh Gregorio Bettiza dalam bukunya yang berjudul "*Finding Faith in Foreign Policy, Religion, and American Diplomacy in a Post secular World*", peran penting agama dalam kebijakan dan pengambilan keputusan dapat dicirikan dari semakin banyaknya kebijakan yang didasari oleh pengaruh agama pada akhir tahun 90-an.

Mengutip dari tulisan Anne Jenichen, Bettiza menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dipengaruhi oleh agama ini, juga berpotensi membentuk ulang realitas global mengenai keterkaitan antara agama dan kebijakan luar negeri di Amerika Serikat, termasuk juga kaitannya dengan norma dan kepentingan (Jenichen, 2020, pp. 2-3). Buku yang dituliskan oleh G. Bettiza ini menjadi salah satu gambaran dari

banyaknya bukti nyata interaksi dan pengaruh antara, agama, negara, dan politik.

Memperkuat bukti nyata dari pengaruh agama dalam dunia politik, peneliti juga mengambil banyak bukti dari tulisan Carolyn M. Warner dan Stephen G. Walker, yang berjudul "*Thinking About the Role of Religion in Foreign Policy: A Framework for Analysis*". Pada artikel ini, Warner dan Walker membahas bagaimana agama mempengaruhi beberapa kebijakan luar negeri dan banyaknya fenomena dalam dunia internasional. Dituliskan bahwa, agama dari seorang pemimpin juga dapat menjadi pengaruh utama dari pilihan sebuah kebijakan luar negeri negara yang dipimpinnya.

Mengutip dari tulisan Warner dan Walker, terdapat pernyataan bagaimana agama memainkan berbagai peran penting dalam kehidupan manusia dan sebagai sumber dari nilai-nilai dalam pandangan di dunia internasional, menurut dari Fox dan Sandler. Agama kemudian didefinisikan sebagai sekumpulan kepercayaan spiritual yang kemudian diinterpretasikan oleh institusi, komunitas, dan praktiknya oleh Bruce Lincoln.

Agama juga jika dikaitkan dengan perannya dalam politik internasional, diartikan sebagai seperangkat kepercayaan, budaya, dan sumber dari nilai-nilai (Warner & Walker, 2011, pp. 114-115). Agama dianggap sebagai pembawa informasi bersamaan dengan petunjuk untuk mendefinisikan hal-hal dan kegiatan yang dianggap "*appropriate*" atau "*pantas*". Kemudian, agama menjadi pandangan secara internasional dan

mempengaruhi pandangan politik secara internasional, serta memberikan petunjuk (Warner & Walker, 2011, p. 118).

Masih membahas mengenai bagaimana agama memberikan pengaruh gagasan terhadap sebuah kebijakan secara internasional, peneliti juga menambahkan bukti bagaimana agama mempengaruhi politik internasional dengan berbagai macam cara. Yaitu, seperti yang dijelaskan dalam artikel Jonathan Fox dengan judul “*Religion as an Overlooked Element in International Relations*”, yang memberikan banyak bukti bagaimana agama dapat memberikan kontribusi besar dalam pandangan politik internasional.

Di lain sisi, juga masih sering dianggap dan dipandang sebelah mata perannya dalam politik internasional. Fox berargumen bahwa, agama seringkali diabaikan keberadaannya di politik internasional, oleh karena terdapat banyak penolakan dari pandangan *social sciences*. Ketika pada faktanya, agama juga memainkan peran penting dan besar dalam politik internasional (Fox, 2001, p. 54). Fox juga kemudian memberikan gambaran bagaimana agama dan atau kepercayaan dapat mempengaruhi politik internasional, yaitu dengan 3 cara utama.

Yang pertama, dengan melalui para pembuat kebijakan dan proses pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri. Kedua, agama sebagai sumber legitimasi untuk mendukung dan mengkritik perilaku pemerintahan local dan internasional. Ketiga, pengaruh dari banyaknya isu local dan internasional terkait dengan agama, termasuk juga konflik, yang kemudian

menjadi tersebar, bahkan menjadi isu dalam dunia internasional (Fox, 2001, pp. 59-71).

Kemudian kepercayaan kedua, yaitu *principled beliefs* atau keyakinan yang telah menjadi prinsip dalam kehidupan seorang individu atau kelompok. Jenis keyakinan ini, merupakan keyakinan normative yang biasanya membedakan mana hal yang dianggap baik dan mana hal yang dianggap buruk bagi seseorang atau kelompok. Seperti yang disebutkan dalam tulisan Ethan A. Nadelmann yang berjudul “*Global Prohibition Regimes: The Evolution of Norms in International Society*”, norma menjadi salah satu bukti keyakinan yang telah tertanam dalam diri seseorang atau sekelompok orang.

Norma juga senantiasa berkembang, berevolusi, dan tersebar dalam masyarakat internasional. Norma banyak masuk dan terinstitusionalisasi ke dalam regime internasional. Seperti bukti norma yang tertanam terkait dengan adanya legalitas pembajakan kapal pada masa perang di zaman dahulu. Kegiatan ini pernah diwajibkan, bahkan dianjurkan, untuk memperkuat keberadaan sebuah negara. Sekarang, oleh karena perkembangan dari norma itu sendiri, kegiatan ini dianggap salah dan di delegitimasi oleh negara-negara, dimulai dari abad ke-19 (Nadelmann, 1990, pp. 486-491).

Begitu juga pandangan dan norma yang tertanam mengenai perbudakan dan perdagangan budak yang sangat diwajibkan keberadaannya pada zaman dahulu di berbagai belahan dunia, utamanya di Benua Afrika,

Asia, dan Kekaisaran Ottaman. Hingga pada akhirnya, hal ini dianggap melanggar norma karena dipercayai melukai hak asasi manusia dan sebagai sesuatu yang tidak bermoral dimulai pada abad ke-19 (Nadelmann, 1990, pp. 491-498). Masih banyak juga hal lainnya yang dianggap melanggar norma seiring dengan berjalannya waktu, seperti prostitusi, perdagangan obat-obatan terlarang, dan pemburuan hewan-hewan, seperti gajah dan paus. Dengan adanya seperangkat norma ini, dianggap dapat memberikan masa depan yang lebih baik dan kehidupan yang bermoral.

Bukti lainnya mengenai penerapan norma, terdapat juga di dalam buku karya Martha Finnemore, yang berjudul "*The Purpose of Intervention*". Yang secara garis besar membahas mengenai perubahan kepercayaan dalam penggunaan kekerasan pada kegiatan bernegara dan pada alasan dibalik adanya intervensi. Hal ini juga dianggap sebagai pengaruh dari meningkatnya norma dan moral dalam berbagai aspek kehidupan politik global (Finnemore, 2003).

Bukti lainnya terkait dengan pengaruh norma dalam kebijakan dan kehidupan politik internasional dapat dilihat juga dari beberapa aksi nyata di negara-negara Amerika Latin. Sebagaimana yang dituliskan dalam artikel yang berjudul "*Latin America Countries as Norms Protagonist of the Idea of International Human Rights*" oleh Kathryn Sikkink, negara-negara di Latin Amerika dianggap sebagai bukti nyata dari penerapan norma dalam politik internasional. Dalam politik internasional, negara-negara Latin Amerika banyak memberikan kontribusi, namun tidak mendapat banyak

perhatian seperti terhadap negara-negara maju, termasuk juga seperti terhadap Amerika Serikat.

Mengutip dari artikel karya Sikkink tersebut, pada kenyataannya negara Amerika Latin, memiliki tradisi yang kuat terkait pemberian dukungan terhadap kedaulatan, kesetaraan, dan konsep non intervensi dari negara-negara yang dianggap “berkuasa” (Sikkink, *Latin American Countries as Norm Protagonists of the Idea of International Human Rights*, 2014, p. 391). Dengan adanya banyak perkembangan dalam dukungan terhadap hak asasi manusia dalam politik regional dan internasional, dianggap sebagai manifestasi dari ide yang ditawarkan oleh negara-negara Amerika Latin yang dibawakan dalam Konferensi San Fransisco, yang di artikulaskan dalam *American Declaration of the Rights and Duties of Man* (Sikkink, *Latin American Countries as Norm Protagonists of the Idea of International Human Rights*, 2014, p. 400).

Bukti lain juga terdapat dalam artikel karya Sikkink yang berjudul “*From Pariah State to Global Protagonist: Argentina and the Struggle for International Human Rights*”. Yang membahas bagaimana Argentina menjadi salah satu negara di luar “*wealthy north*” yang dianggap memiliki pandangan kuat terhadap idenya terkait dengan hak asasi manusia secara global. Sebagai bukti nyata, Argentina menjadi salah satu negara yang mengeluarkan banyak rezim berdasarkan dari moral dan atau norma.

Seperti dalam mengatasi fenomena penculikan massal di tahun 1973-1983, dengan membentuk komisi kebenaran “*The National*

Commission on Disappearance” dan juga pembentukan “*family groups*” bagi mereka yang menjadi korban dan terdampak dari peristiwa penculikan massal tersebut (Sikkink, *From Pariah State to Global Protagonist: Argentina and the Struggle for International Human Rights*, 2008, p. 3). Bukti lainnya juga, para diplomat asal Argentina dengan aktif membantu *International Criminal Court* dalam mempromosikan keberhasilan dari pelaksanaan hak asasi manusia secara internasional (Sikkink, *From Pariah State to Global Protagonist: Argentina and the Struggle for International Human Rights*, 2008, p. 15).

Banyaknya tulisan yang menunjukkan perbedaan dalam prinsip kepercayaan yang tertanam dalam individu, kelompok, dan negara. Termasuk juga pengaruhnya terhadap norma-norma dalam masyarakat dan politik internasional, yang berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan sebuah negara. Seperti juga yang tertulis dalam buku karya Goldstein dan Keohane, mengenai *principled beliefs* ini. Bukti lainnya adalah pandangan terhadap aborsi, di beberapa negara dan dalam masyarakat, aborsi dianggap sesuatu yang salah karena melanggar hak asasi manusia. Namun di bagian negara dan sisi lainnya dalam masyarakat, aborsi diwajibkan bahkan dianjurkan, karena dianggap sebagai wujud dari “hak kebebasan” bagi para perempuan.

Buku karya Nina Tannenwald, yang berjudul “*The Nuclear Taboo: The United States and the Normative Basis of Nuclear Non-Use*”, yang memberikan gambaran mengenai nilai normative dari penggunaan nuklir

dalam kehidupan bernegara, utamanya dilihat dari kebijakan Amerika Serikat. Penggunaan senjata nuklir pada masa sekarang, dianggap taboo dan akan melukai banyak nilai-nilai dan kehidupan berbangsa dan bernegara (Tannenwald, 1999).

Selanjutnya, yang juga akan menjadi dasar kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yaitu *causal beliefs*. Keyakinan ini memberikan efek sebab akibat terhadap gagasan dan kebijakan, yang biasanya dipengaruhi oleh seseorang yang dianggap penting atau tokoh berpengaruh, seperti *scientist*, tokoh pemuka agama, politikus, filsuf, dan sebagainya. *Causal beliefs* ini memberikan arahan terhadap strategi dalam mencapai tujuan, nilai-nilai, dan keyakinan yang tertanam sejak lama. Terdapat banyak literasi yang menjelaskan mengenai *causal belief* dan juga pelaksanaannya pada sebuah kebijakan.

Sebagai bukti dari salah satu artikel tulisan Albert Yee yang berjudul “*The Causal Effects of Ideas on Policies*”, terdapat 3 pendekatan dari bagaimana ide dapat mempengaruhi sebuah kebijakan dan institusi. Yang pertama, melalui peran dari adanya *epistemic communities* dalam dunia internasional. Mengutip dari Peter Haas, *epistemic community* merupakan sekumpulan komunitas individu yang berasal dari kalangan profesional dan kompeten di berbagai bidangnya, yang juga dianggap memiliki pengetahuan terkait dengan kebijakan luar negeri (Yee, 1996, p. 86). Kedua, ide dan atau gagasan mempengaruhi kebijakan melalui sebuah institusi. Dan ketiga, masih dengan melalui institusi, yang juga fokus bukan hanya

terhadap bagaimanapara pembuat kebijakan membuat keputusan, tetapi lebih kepada bagaimana pengaruh gagasan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri (Yee, 1996, p. 92).

Berbicara mengenai *epistemic community*, menjadi salah satu bukti pentingnya ide kausal dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara. Berkaitan dengan bagaimana komunitas epistemic ini membantu sebuah negara dalam merancang kebijakan luar negeri dan dalam koordinasi kebijakan internasional (Haas, 1992, p. 2). Haas juga kemudian menjelaskan sebuah alur bagaimana komunitas ini dapat mempengaruhi adanya kebijakan luar negeri dari sebuah negara yang diawali oleh ketidakpastian atau keraguan dalam memendang suatu hal.

Dari adanya ketidakpastian ini, negara dan juga para pemimpinnya banyak membutuhkan informasi yang kredibel dari sumber yang dapat dipercaya. Maka dari itu mereka biasanya menggunakan pengetahuan dan pendapat dari para komunitas epistemic, yang juga berperan sebagai pemberi saran dalam sebuah kebijakan. Kemudian nantinya, hasil dari pengetahuan dan saran ini dapat mempengaruhi para pembuat kebijakan, institusi, hingga ke koordinasi kebijakan dalam tingkat internasional (Haas, 1992, pp. 4-11).

Literatur lainnya terkait dengan penjelasan mengenai kepercayaan kausal adalah terdapat dalam Tulisa Marij Swinkels yang berjudul "*How Ideas Matter in Public Policy: A Review of Concepts, Mechanism, and Methods*". Ide dan atau gagasan ini didefinisikan sebagai kepercayaan yang

dimiliki oleh seorang individu atau diangkat dari institusi, yang kemudian nantinya akan mempengaruhi keputusan dan juga perilaku mereka (Swinkels, 2020, p. 283). Seperti pada definisinya mengenai kepercayaan kausal ini, pengetahuan ilmiah ini menjadi salah satu bukti ide kausal yang berperan penting dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan.

Berbeda dengan pemikiran dari Judith dan Keohane, penjelasan mengenai ide kausal dalam tulisan oleh Jakob Edler dan rekan, ide pada tulisan ini juga digerakan oleh *interest* atau kepentingan. Namun pada penerapannya ide masih memegang peranan penting, karena ide dianggap memberikan petunjuk dan tata cara untuk kegiatan berpolitik dan dalam pembuatan kebijakan (Edler, Karaulova, & Barker, 2022, p. 215).

Salah satu unsur dalam ide kausal berasal adalah melalui jejak histori dan kebudayaan yang telah tertanam lama pada negara dan juga individu. Hal ini juga kemudian yang akan mempengaruhi bagaimana seorang individu, kelompok, dan negara akan berperilaku dalam politik internasional, termasuk juga bagaimana sebuah negara memposisikan dirinya pada panggung internasional. Seperti yang dijelaskan dalam literasi karya Mohamad Rosyidin, mengenai kebudayaan strategis dari negara China, yang menganggap bahwa kebudayaan menjadi salah satu faktor utama dari perilaku agresif dari China, khususnya di Laut China Selatan.

Mengutip dari artikel, bahwa kebudayaan strategis mengadopsi "*culturalism*" dan kemudian mempengaruhi perilaku sebuah negara, dalam pembahasan ini contohnya adalah China (Rosyidin, China's Strategic

Culture and the Challenge of Security Management in the South China Sea Dispute, 2017, p. 136). Seperti pandangan yang didasari dari konsep “*yin and yang*” dan juga kebijakan dualism atau biasa dikenal dengan “*The Dao of Foreign Policy*” oleh China (Rosyidin, *The Dao of Foreign Policy: Understanding China's Dual Strategy in the South China Sea*, 2019). Hal ini menjadi salah satu bukti dari penggunaan gagasan yang datang dari jejak histori dan kebudayaan yang telah lama tertanam di sebuah negara.

Seperti pada umumnya, gagasan memiliki banyak kegunaan dalam pelaksanaannya. Termasuk juga seperti dalam teori ini, di mana gagasan memiliki berbagai kegunaan berkaitan dengan pengaruhnya terhadap kebijakan luar negeri. Secara teori, gagasan dapat digunakan sebagai “*pathway*” yang dibagi menjadi 3 jenis. Pertama *idea as a road maps*, yaitu gagasan sebagai petunjuk arah dan sebagai pembeda akan “*dos and don'ts*” dalam membuat sebuah kebijakan.

Kedua, terdapat *ideas as focal points*, yaitu gagasan berfungsi untuk mencari kesamaan dan untuk mempertemukan pandangan berbeda. Mudahnya, gagasan pada *pathway* ini berfungsi sebagai cara untuk menemukan benang merah. Terakhir, terdapat *institutionalization*, dimana sebuah gagasan telah terinstitusionalisasi ke dalam sebuah kebijakan, diterapkan, dan menjadi dasar dalam sebuah kebijakan atau institusi secara legal, dan akan dilaksanakan secara terus menerus. Berkaitan dengan topik penelitian ini, teori gagasan dan kebijakan luar negeri diharapkan dapat menjelaskan pengaruh dari gagasan *Atmanirbhar Bharat Abhiyaan* sebagai

dasar dari kebijakan pemerintah India terkait pemblokiran aplikasi asal China.

1.5.2. Konsep Cyber Threat

Penelitian ini juga menggunakan konsep mengenai keamanan dalam dunia siber, lebih tepatnya konsep *cyber threat*. Penjelasan mengenai *cyber threat* ini memiliki banyak keterkaitan dengan beberapa jenis dan ruang lingkup lainnya dalam kejahatan siber. Dalam penelitian ini, konsep *cyber threat* atau ancaman siber dapat mendukung argument mengenai studi kasus yang diangkat dalam penelitian.

Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi, mengakibatkan juga semakin tingginya risiko terhadap adanya kejahatan di ruang siber yang tidak ada batasnya ini. Oleh karena hal tersebut, terdapat banyak pengertian, bentuk, dan jenis dari pelanggaran terhadap siber dalam konsep *cyber threat* ini. Hal ini dikarenakan “ancaman” yang dimaksudkan dapat menargetkan berbagai lingkup dalam ruang siber. Dengan kemudahan adanya akses teknologi dan internet, menjadikan kejahatan dalam ruang siber ini semakin mudah terjadi. Serta dapat dengan mudah dilakukan oleh individu, kelompok, bahkan setingkat negara sekalipun yang ditargetkan untuk memberikan kerugian terhadap entitas yang menjadi tujuan serangan siber.

Dalam salah satu buku mengenai kejahatan siber juga dijelaskan mengenai bagaimana *cyber threat* memiliki keterkaitan dengan *cybercrime*. Konsep ini juga hadir bersamaan dengan konsep *computer crime*. Hal ini bisa muncul oleh karena bagaimana teknologi kemudian menjadi fasilitator

dalam pelaksanaan tindakan kriminal, lebih tepatnya dalam ruang siber dan teknologi. Hal yang menjadi perbedaan adalah *computer crime* lebih berfokus terhadap bagaimana pelaku kejahatan menggunakan keahliannya dalam teknologi computer (Holt, Bossler, & Seigfried-Spellar, 2018).

Oleh karena itu, melalui konsep yang dijelaskan dalam buku ini, peneliti akan menggunakan istilah ancaman siber karena banyaknya kejahatan yang dapat terjadi melalui dalam lingkungan daring dan dengan penggunaan komputer serta perangkat seluler yang terhubung ke Internet (Holt, Bossler, & Seigfried-Spellar, 2018). Terdapat beberapa penyebab dan pengaruh yang menjelaskan bagaimana ancaman dalam dunia siber ini bisa terjadi. Salah satunya yang paling utama tentunya adalah dari kemajuan teknologi dan akses terhadap internet di kehidupan sehari-hari.

Istilah *cyber threat* ini menjadi salah satu bagian dari keamanan siber yang ada dalam lingkup Hubungan Internasional. Termasuk bagaimana banyak negara yang dapat melakukan ancaman terhadap negara lainnya sebagai bentuk penyerangan dan gangguan terhadap keamanan di sebuah negara. Ancaman siber ini sendiri dapat diartikan dalam berbagai konteks di lingkup hubungan internasional. Termasuk juga bagaimana para pemikir konstruktivis yang melihat konsep keamanan siber sebagai bentuk konstruksi sosial di masyarakat (Valeriano & Maness, 2018).

Secara umum, ancaman siber ini dapat diartikan sebagai bentuk gangguan yang diberikan oleh individu tau kelompok, juga negara, yang menargetkan ke negara lainnya dan dapat mengganggu keamanan negara

tersebut. Selain itu, dalam konsep ancaman di dunia siber ini juga bisa datang dalam berbagai jenis dan bentuk ancaman. Tergantung bagaimana sebuah negara menginterpretasikan bentuk ancaman tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu hal yang mengganggu. Adanya ancaman siber ini juga jika dibiarkan, dapat berujung kepada bentuk pelanggaran, hingga ke konflik siber di dalam sebuah negara.

Dalam dunia online, banyak entitas dan atau pelaku kejahatan yang menyerang individu, kelompok, bahkan menargetkan negara untuk melakukan aksi kejahatannya dalam ruang siber. Semua dapat dilakukan melalui media sosial, *email*, nomor pribadi, hingga akses terhadap *website* resmi sebuah negara atau perusahaan tertentu. Namun, oleh karena ruang lingkup yang sangat luas dan abstrak, terdapat sedikit kesulitan dalam mengidentifikasi permasalahan dan juga pelanggaran yang dilakukan dalam ruang siber.

Dalam buku, dijelaskan mengenai bukti teknologi, atau juga yang dimaksudkan sebagai bukti yang bisa dilihat melalui perangkat yang digunakan. Di lain sisi, hal ini tetap menyulitkan bagi para penegak hukum di berbagai negara yang menerapkan peraturan terkait dengan ancaman dalam dunia siber. Hal tersebut masih diakibatkan oleh karena luasnya ancaman dan ruang lingkup yang dapat terjadi di ruang siber. Maka dari itu masih terasa sulit untuk memberikan bukti nyata akan adanya pelanggaran di dalam dunia siber, kecuali dengan cara memetakan serangan atau pelanggaran dan dengan melalui bukti teknologi yang disebutkan tersebut.

Melalui konsep ini juga, peneliti menambahkan cara pandang dalam *security* yang kemudian ingin mengidentifikasi jenis ancaman dan serangan yang mungkin terjadi dalam ruang siber. Dalam penelitian ini, yaitu bagaimana aplikasi-aplikasi asal China ini “mengancam” integritas dan keamanan nasional di India.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. *Athmanirbhar Bharat Abhiyaan*

Mengutip dari lama resmi India, *Atmanirbhar Bharat Abhiyaan* ini merupakan sebuah inisiatif atau juga dikenal sebagai visi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri India Narendra Modi pada 12 Mei 2020 (Make In India, 2020). Pada pelaksanaannya, kampanye ini memiliki 5 pilar utama, di antaranya adalah Ekonomi, Infrastruktur, Sistem dan Teknologi, Demografi, and Permintaan.

Tujuan dari adanya inisiatif dan atau visi ini adalah untuk memperkuat cita-cita negara India sebagai negara yang mandiri dan dapat memenuhi segala kebutuhan untuk masyarakatnya dalam berbagai bidang dan sector kehidupan. Berbagai kebijakan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari visi yang tertanam di India ini. Termasuk juga untuk mempromosikan barang dagang dari India ke pasar global, meningkatkan sumber daya

manusia yang ada, dan memaksimalkan kehidupan bernegara yang lebih baik lagi (Invest India, 2020).

1.6.1.2. Aplikasi Software

Merupakan sebuah perangkat lunak yang tertanam di dalam media teknologi yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari (Struyk, 2022). Perangkat lunak ini berupa aplikasi yang dapat digunakan dan diakses sehari-hari oleh penggunanya. Aplikasi juga memiliki berbagai jenis berdasarkan kegunaannya, seperti untuk pekerjaan, edukasi, hiburan, termasuk juga media sosial. Aplikasi ini dapat diakses melalui system yang ada dalam media teknologi, seperti computer, ponsel, dan lain sebagainya. Bukti nyata dari aplikasi *software* ini di antaranya adalah, *Microsoft office*, Line, TikTok, Instagram, dan masih banyak lagi lainnya.

1.6.1.3. Cyber Threat

Konsep *cyber threat*, diartikan sebagai bentuk ancaman dan pelanggaran yang dilakukan oleh individu, kelompok, hingga tingkat negara dalam ruang lingkup siber. Ancaman yang diberikan dapat berarti luas dan menyangkut banyak hal dalam ruang siber.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Atmanirbhar Bharat Abhiyaan

Dalam penelitian ini, penggunaan visi *Atmanirbhar Bharat Abhiyaan*, secara spesifik akan membahas mengenai pilar yang berkaitan dengan informasi, system, dan teknologi. Hal ini juga

kemudian diukur melalui kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah India, yaitu terkait dengan pemblokiran aplikasi *software* asal China. Selain itu, pada penelitian ini juga secara spesifik akan membahas mengenai latar belakang dari adanya visi *Atmanirbhar Bharat Abhiyaan* secara historical dan melalui gagasan dibalik terbentuknya visi tersebut.

1.6.2.2. Aplikasi Software

Pada penelitian ini, penggunaan aplikasi *software* berfokus kepada pembahasan mengenai aplikasi asal China yang diblokir di negara India. Aplikasi tersebut secara spesifik dibuat dan berasal dari negara China dan sudah tidak dapat beroperasi lagi di India, oleh karena kebijakan pemblokiran aplikasi *software* tersebut. Aplikasi tersebut termasuk di dalamnya, yaitu TikTok, WeChat, PUBG, dan masih banyak lagi lainnya.

1.6.2.3. Cyber Threat

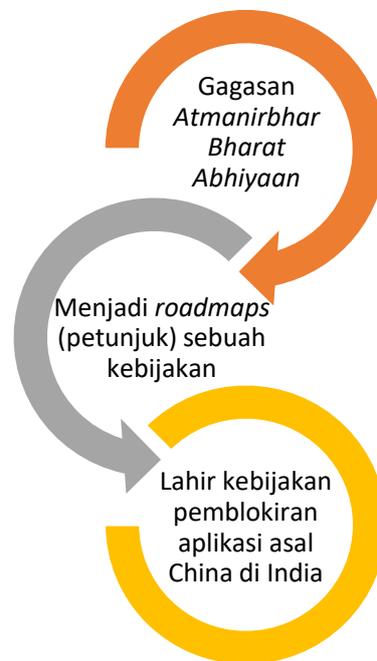
Dalam penelitian ini, konsep *cyber threat* atau ancaman siber digunakan sebagai penjelasan dari bagaimana aplikasi asal China dianggap melakukan “ancaman” dan terindikasi melakukan tindak kejahatan dalam ruang lingkup siber. Hal ini juga berkaitan dengan pelanggaran yang menyimpang dari nilai-nilai dalam inisiatif *Atmanirbhar Bharat Abhiyaan* di India.

1.7. Argumen Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan teori, peneliti memiliki argumen sementara alasan dari kebijakan pemblokiran aplikasi *software* asal China di India adalah karena pengaruh dari gagasan yang tertanam di dalam inisiatif *Atmanirbhar Bharat Abhiyaan*. Inisiatif ini merupakan sebuah landasan yang diinisiasikan oleh Perdana Menteri Narendra Modi di tahun 2020 lalu di India dan menjadi bagian dari berbagai kebijakan baik dalam, maupun luar negeri India. Peneliti memperkuat alasan ini menggunakan penjelasan berdasarkan dari teori *Ideas and Foreign Policy* oleh Roberth Keohane dan Judith Goldstein, yaitu ketika sebuah kebijakan dipengaruhi oleh ide dan atau gagasan yang tertanam sebelumnya.

Pada penelitian ini kemudian dijelaskan dengan menggunakan indikator dalam teori dan bagaimana ide dan atau gagasan tersebut bisa mempengaruhi kebijakan di India tersebut, sebagai petunjuk, yaitu bagaimana gagasan *Atmanirbhar Bharat Abhiyaan* berasal dari *causal* dan *principled belief*. Kemudian berperan sebagai petunjuk atau *roadmaps* dalam perumusan kebijakan luar negeri di India, yaitu dalam hal ini kebijakan pemblokiran aplikasi asal China di India.

Gambar 1.1. Alur Berfikir Penelitian



1.8. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, yang berfokus untuk melihat dan menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi untuk digunakan dalam penelitian.

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah metode kualitatif dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data. Secara umum, metode kualitatif merupakan sebuah metode yang banyak digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena dalam penelitian. Dari beberapa ahli dalam dunia penelitian kualitatif, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang berusaha menjelaskan berbagai keberagaman fenomena dalam kehidupan sosial, serta dengan menggunakan penggambaran data

dengan tipe yang naratif dan juga eksplanatif (Anggito & Setiawan, S.Pd., 2018). Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan bentuk penjelasan yang komprehensif dan dapat juga mewakili hasil penelitian yang ada.

Dengan menggunakan metode kualitatif ini, diharapkan dapat berfungsi untuk menjelaskan sebuah fenomena dengan lebih mendalam dan sesuai dengan hasil studi yang ada di lapangan (Fadli, 2021). Sebagai salah satu bagian penting dalam ilmu pengetahuan, penelitian tentu memiliki metode tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti halnya dalam penelitian ini, metode kualitatif yang digunakan dimaksudkan akan memudahkan peneliti dalam melihat subjek penelitian dan menjelaskannya ke dalam hasil penelitian secara lebih terperinci. Karena juga, pada metode penelitian kualitatif ini akan melibatkan peneliti dengan situasi penelitian yang ada (Fadli, 2021).

1.8.2. Subjek Penelitian

Subjek yang menjadi bagian dari penelitian ini adalah negara dan atau pemerintahan India yang terlibat dalam pembuatan kebijakan terkait dengan pemblokiran aplikasi *software* asal China dan juga kaitannya dengan kampanye *Athmanirbhar Bharat Abhiyaan*.

1.8.3. Jenis Data

Berdasarkan dari jenis penelitian, terdapat jenis data tertentu yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan dari bagaimana peneliti memperoleh data. Data yang akan digunakan adalah data yang bersifat

primer dan juga sekunder. Berdasarkan pengertian dari Joop J. Hox dan Hennie R. Boeije, data ini biasa disebut sebagai data primer, yaitu data yang diambil langsung melalui beberapa tahapan seperti wawancara, survey, dan juga data lainnya yang ditemukan saat penelitian (Hox & Boeije, 2006). Sedangkan untuk data sekunder, merupakan data yang didapatkan dari sumber-sumber sekunder, seperti dari informasi-informasi tertentu yang didapatkan dari internet, buku, jurnal, dan karya ilmiah tertentu terkait dengan penelitian yang dilakukan.

1.8.4. *Sumber Data*

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data melalui hasil wawancara dan atau pernyataan tertulis dari pemerintahan India terkait dengan kebijakan yang mereka keluarkan. Data ini diambil melalui berbagai situs resmi dari Pemerintah India dan pernyataan lainnya dari situs resmi serupa, seperti Kedutaan Besar India dan China. Sumber lainnya yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan menggunakan sumber dari referensi dalam penelitian, jurnal, dan juga berbagai data yang dikeluarkan di media massa terkait dengan fenomena yang ada.

1.8.5. *Teknik Pengumpulan Data*

Peneliti pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung, seperti yang pada umumnya dilakukan dalam metode penelitian kualitatif. Guna mendapatkan data secara langsung dengan lebih baik dan akurat, maka dari itu terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan dalam teknik ini. Yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung

dengan beberapa pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian dan juga observasi sebagai langkah untuk mendapatkan data secara langsung di lapangan (Dr. J.R. Raco, 2010).

Observasi secara langsung ini juga biasa disebut sebagai metode penelitian atau pengumpulan data *field research*. Dimana peneliti akan mengumpulkan data dengan terjun secara langsung ke lapangan agar memberikan gambaran secara langsung tentang fenomena yang sedang diteliti (Dr. J.R. Raco, 2010). Namun dalam penelitian ini, teknik mengumpulkan data dengan cara observasi akan sulit dilakukan oleh karena lokasi yang menjadi objek penelitian berada jauh dari lokasi peneliti.

Di sisi lain, teknik wawancara masih bisa dilakukan dengan cara mencari data melalui beberapa narasumber terkait yang bisa ditemukan di lokasi peneliti berasal, yaitu di Indonesia. Harapannya dengan menggunakan teknik wawancara ini, peneliti bisa mendapatkan data yang lebih kredibel dan menemukan data dari beberapa sudut pandang. Teknik selanjutnya pada penelitian ini adalah dengan cara penelusuran kepustakaan atau riset pustaka. Hal ini juga berkaitan dengan teknik *desk research*, yaitu dengan cara mencari informasi dan data-data yang diperlukan dalam penelitian melalui sumber-sumber tertentu yang ditemukan di saat penelitian.

Termasuk juga dalam literatur-literatur yang berkaitan dengan topik pada penelitian ini, baik dari melalui buku, jurnal, artikel, maupun dari situs-situs terkait dengan topik penelitian. Setelah melakukan wawancara dan

juga riset pustaka, peneliti kemudian melakukan analisis serta interpretasi data yang cocok untuk digunakan dalam menjawab pertanyaan pada perumusan masalah yang telah ada untuk memudahkan penelitian.

1.8.6. Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang berlandaskan rumusan masalah dengan kata “bagaimana”, yang berarti menggunakan tipe deskriptif dengan cara penjelasan secara deduktif. Yaitu penjelasan mengenai hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, juga berkaitan dengan hubungan klausalitas atau sebab akibat. Mengutip dari Miles dan Huberman, oleh karena tipe penelitian kualitatif ini merupakan salah satu penelitian dengan data yang terbilang kompleks, maka peneliti harus mempertahankan setiap kualitas dari data yang diperoleh (Sarosa, 2021).

Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisis dan interpretasi data yang didasari oleh pemikiran dari Miles dan Huberman dalam model analisis data kualitatif milik mereka. Dikutip melalui buku karya Sarosa, terdapat tahapan dalam analisis data tersebut yang secara umum dapat dijabarkan dengan cara pertama, proses memilih dan memadatkan data yang telah ditemukan, kemudian membuat penarikan kesimpulan dari data yang telah dipadatkan, dan terakhir, proses verifikasi data dan kesimpulan yang ada (Sarosa, 2021). Hal ini juga diperkuat dengan menggunakan keterkaitannya terhadap teori dan konsep yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.